

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
KLATEN

NOMOR : 500.12.18.1 / 73 / 21

TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN
KLATEN TAHUN 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen surat pertanggung jawaban keuangan yang belum diaudit.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Terbuka apabila sudah di audit.

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2	Informasi data pribadi yang meliputi • Nomor KK, NIK • keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, • data rekam medis masyarakat di Kabupaten Klaten • Data wajib pajak.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 1. Pasal 1 Angka 22 Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya 2. Pasal 8 ayat (1) huruf e, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan berkewajiban menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi keuangan serta tindakan kriminal lainnya	Melindungi kerahasiaan, kebenaran dan kevalidan data penduduk	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		3. Pasal 58 ayat (2) bahwa data perseorangan meliputi nomor kartu keluarga; nomor induk kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir;tanggal/bulan/ tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/ atau mental; Pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat			

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah; nomor akta perkawinan/ buku nikah; nomor akta perceraian/ surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya merupakan aib seseorang			
3	Aduan/laporan dari masyarakat, perangkat daerah/instansi terkait dugaan pelanggaran disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap informasi berkaitan hak pribadi dan mengancam	Melindungi hak pribadi dan keselamatan pengadu	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	dan kode etik ASN. Yang meliputi informasi pelapor, terlapor dan substansi laporan.		keselamatan pengadu		tertulis dari yang bersangkutan
4	Daftar IP server, topologi jaringan, open dan close port, lokasi dan spesifikasi server, username dan password aplikasi, daftar akun pengguna aplikasi dan daftar admin web Pemerintah Kabupaten Klaten	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak	Selama password/kode masih berlaku
5	Informasi rincian HPS, proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, nama dan penilaian tim Pokja.	Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum
6	Dokumen laporan / surat pertanggungjawaban (SPJ) berikut lampirannya	Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	1 tahun atau setelah selesainya audit

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j	yang mendahului sebelum diaudit		
7	Database terkait persebaran Napiter dan Organisasi/ Gerakan Radikal di Klaten	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; b. Membahayakan sistem Intelijen Negara; c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; b. Melindungi sistem intelejen negara; c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan	25 Tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
				fungsi Intelijen	
8	Raw data riset penelitian (data, foto, video, identitas responden)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan penelitian karena adanya pengungkapan secara prematur	Akan memperlancar pelaksanaan penelitian	30 Tahun atau sampai dengan hasil penelitian diumumkan
9	Spesifikasi dan Rancang Bangun Rekayasa Inovasi Teknologi (Sebelum dipatenkan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf i; b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan penelitian karena adanya pengungkapan	a. Melindungi Hak atas kekayaan intelektual; b. Akan memperlancar pelaksanaan penelitian	30 Tahun atau sampai dengan hasil penelitian diumumkan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			secara prematur		
10	Proses penilaian Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan penjurian Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat karena adanya pengungkapan secara prematur	Akan memperlancar pelaksanaan penjurian Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat	30 Tahun
11	Sertifikat tanah asset Barang Milik Daerah (BMD) kabupaten Klaten	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok	Pengamanan dan Perlindungan dari pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah Aparat Penegak hukum
12	Identitas wajib pajak, wajib retribusi dan besaran pajak	a. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang	Akan mengungkapkan data pribadi Wajib	Melindungi data pribadi Wajib Pajak dan	Apabila Wajib Pajak dan Wajib

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), pasal 20 ayat (1); b. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36; c. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 34; d. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 103;	pajak dan Wajib Retribusi yang bersifat rahasia	Waji9b Retribusi yang bersifat rahasia	Retribusi yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
13	Data Detail Perusahaan yang mengajukan Perizinan, meliputi: a. Nilai Investasi; b. Peta Lokasi atau titik koordinat yang diajukan perusahaan; c. Data hasil survey perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 Tahun

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Klaten
Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Klaten,



ARIS PRAMANA, S.E.,MM.